Katalog BPS : 9302020.3515

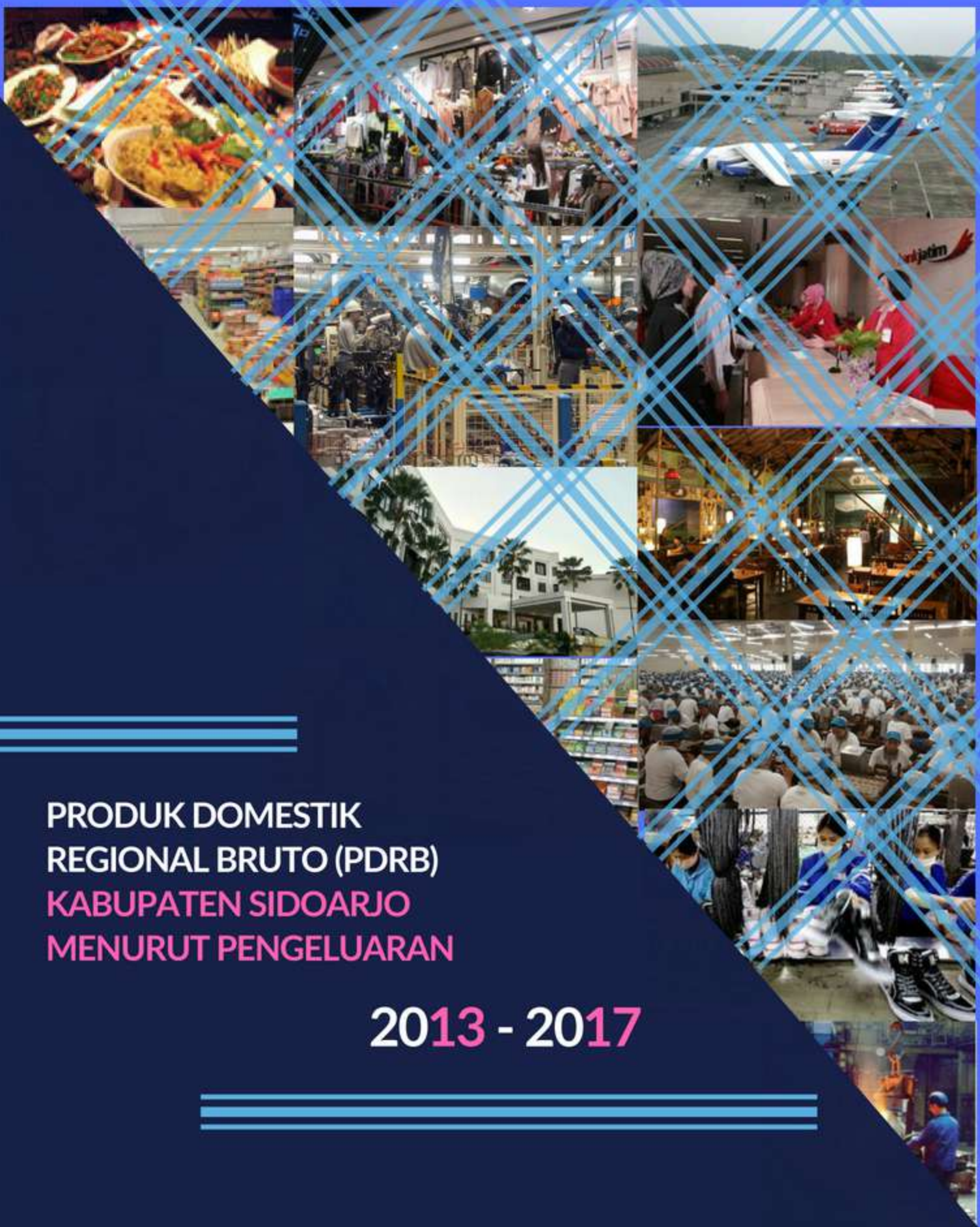

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PENGELUARAN

2013 - 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

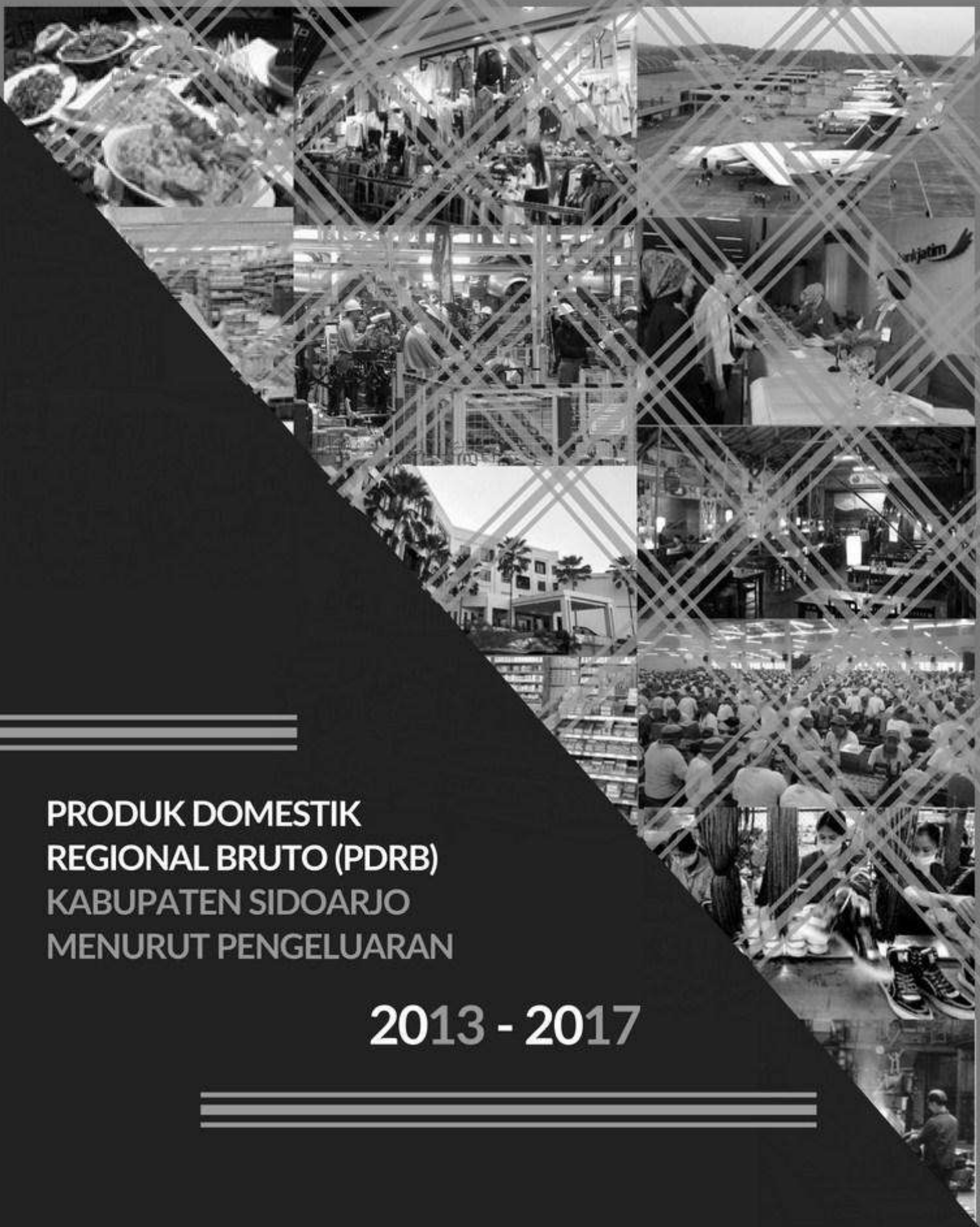

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PENGELUARAN

2013 - 2017

PRODUKDOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SIDOARJO
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

ISSN : -
Nomor Publikasi : -
Katalog BPS : 9302020.3515

Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm
Jumlah halaman : vii + 80 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Dicetak Oleh :
CV. SINAR JAYA

CETAKAN KE-2 (DUA)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum :
Ir. Patris Sayogyo, MM

Penyunting :
Drs. Sutikno, MM

Penulis :
Faizah Naely, S.St

Pengolah Data :
Faizah Naely, S.St

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sidoarjo, Agustus 2018

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sidoarjo
Kepala,

Ir. Patris Sayogyo, MM
NIP. 19610410 199003 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Grafik		vi
Daftar Lampiran		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDRB)	3
	1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
	1.3. Kegunaan Statistik PDRB	11
BAB II	METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
	2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	13
	2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT)	16
	2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	18
	2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	21
	2.5 Perubahan Inventori	25
	2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	28
BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SIDOARJO BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2013-2017	31
	3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran	34
	3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	40
	3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	45
	3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	46
	3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	48
	3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	50
	3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	51
	3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	53

3.9 Perkembangan Net Ekspor antar daerah 55

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SIDOARJO 2013-2017 57

4.1 PDRB (Nominal) 59

4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor..... 60

4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 61

4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB 61

4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB 62

4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor 63

4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan 64

4.8 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*) 65

4.9 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) 66

PENUTUP 69

LAMPIRAN 73

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013-2017 34

Tabel 3.2. PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013-2017 36

Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013-2017 37

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013-2017 38

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran , 2013-2017 39

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 40

Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 42

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 43

Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 44

Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 45

Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 46

Tabel 3.12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017..... 49

Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 51

Tabel 3.14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 52

Tabel 3.15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 53

Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 59

Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Kabupaten Sidoarjo Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor 2013-2017 60

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 61

Tabel 4.4. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 62

Tabel 4.5. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kabupaten Sidoarjo 2013-2017... 63

Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Sidoarjo 2013-2017 64

Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017 64

Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Sidoarjo 2013-2017 66

Tabel 4.9. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Sidoarjo, 2013-2017..... 67

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017 35

Grafik 3.2. PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017..... 36

Grafik 3.3. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, (Triliyun rupiah) 2013 – 2017..... 37

Grafik 3.4. Pertumbuhan Komponen PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, (persen) 2013 – 2017..... 39

Grafik 3.5. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017 50

Grafik 3.6. Perbandingan Pertumbuhan Ekspor dan Impor Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017 (persen)..... 55

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017	75
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017	76
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017	77
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017	78
Lampiran 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017.....	79
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017	80

Pendahuluan

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. **Menurut Pendekatan Produksi**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,

11. Jasa Keuangan dan Asuransi,

12. Real Estat,

13. Jasa Perusahaan,

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,

15. Jasa Pendidikan,

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,

17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. **Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

(1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga

(2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga

(3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah

(4) pembentukan modal tetap domestik bruto

(5) perubahan inventori

(6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca

Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi) [1].

Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (equivalent). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir".

[1] *Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)*

Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep[2], PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat[3], yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai "output akhir (*final output*)". Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari

---

[2] *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

3. *- Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik*
   - Disebut sebagai pendekatan "riil"
   - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y *(Income)*	= PDRB Produksi
C *(Consumption)*	= Konsumsi akhir
GFCF *(Gross Fixed Capital Formation)*	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto" .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara

China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari System of National Accounts (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk Supply and Use Tables (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (benchmark) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kualitas PDRB;
c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
c. Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[4] ;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan

[4] *SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"*

a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

f. Komputer software (computer software and databases/CSD). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

  Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM *(Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (deposits), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).

- Valuasi

  Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (Basic Price). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

  Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5. Perubahan Inventori
4. Perubahan Inventori	6. Ekspor
5. Ekspor	7. Impor
6. Impor	

1.3 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Metode Estimasi dan Sumber Data

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran[1]. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

[1] *Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah*

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali manjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (o*wner occupied dwellings*);

  Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu dikatahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment)*. Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplai* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasi PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
   a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
   b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;

3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah disesuaikan;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan

kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
  Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
  Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, …, 7

j : jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, …, 19

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasi PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah Pusat yang berada di wilayah kabupaten; b. PK-Pemerintah Kabupaten yang

bersangkutan; c. PK-Pemerintah Propinsi yang berada di wilayah kabupaten; d. PK-Pemerintah Desa yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
d. Output Bank Indonesia (BI)
e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Tingkat I dan Tingkat II dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

PK-P ADHB=

Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P kabupaten ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah pusat dan propinsi yang berada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa yang berada diwilayah kabupaten tersebut.

b. PK-P Provinsi ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

   a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.

   b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat yang dikumpulkan datanya oleh BPS Propinsi.

   c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga.

   d. Laporan keuangan perusahaan.

   e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.

   f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

   g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).

   h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

   i. Publikasi Statistik Konstruksi.

   j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

   k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total

penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK 2010, maka PMTB ADHB tersebut di "*deflate"* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis

barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di "*reflate*"(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua,* untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara men"deflate" PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara mendeflasi nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka

perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

f. Ternak untuk tujuan dipotong;

g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara men*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan meng*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing

barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. men*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR dan IMPOR Barang serta Jasa

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor di suatu wilayah kabupaten terdiri dari:

a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar propinsi lain ke/dari kabupaten tersebut
c. Ekspor/impor jasa dari/ke kabupaten/kota lain ke/dari kabupaten tersebut
   Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
d. Net Ekspor antar daerah
   - Ekspor antar daerah
   - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$)
b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$)
c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free* on *board* (*fob*) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang

tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

Tinjauan Perekonomian Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan PDRB Pengeluaran Tahun 2013-2017

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2013 s.d 2017, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh ekonomi dunia, harga komoditas internasional, perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan nasional dan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Sidoarjo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Capaian percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 semakin menguat sebesar 5.8 persen. Penguatan ini tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tumbuh sebesar 5,45 persen, menurun dari tahun sebelumnya (5,57 persen). Kontributor utama perbaikan ekonomi Kabupaten Sidoarjo adalah akselerasi konsumsi (rumahtangga, pemerintah dan LNPRT) serta ekspor ke luar negeri. Peningkatan konsumsi rumahtangga dipengaruhi oleh stabilitas perekonomian yang membaik, inflasi yang rendah dan volatilitas nilai tukar yang terjaga. Begitu pula kinerja ekspor luar negeri meningkat seiring dengan tingginya permintaan negara-negara mitra dagang utama.

Pada sisi yang lain, terlihat komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terus menguat. Investasi pun turut meningkat sejalan dengan realisasi beragam proyek infrastruktur publik dan tempat tinggal. Realisasi beragam proyek infrastruktur pemerintah menunjukkan perbaikan kinerja program pemerintah.

Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Di tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Jawa Timur seiring dengan kontribusi nilai PDRB nya terhadap Jawa Timur, sekitar 12 persen. Kinerja komponen konsumsi akhir (rumahtangga, LNPRT maupun pemerintah) yang mendominasi PDRB seiring dengan pembentukan modal tetap bruto yang cepat didampingi investasi yang tinggi menghasilkan infrastruktur pemerintah, publik dan tempat tinggal; membuat pergerakan ekonomi Sidoarjo melaju dengan baik.

Pergerakan perekonomian Kabupaten Sidoarjo diiringi perbaikan dan pembenahan sarana prasarana, utamanya sarana perhubungan yang menjadi jalur distribusi barang dan jasa dari dan keluar daerah lain. Upaya pembenahan jalur transportasi itu meliputi pembenahan dan pelebaran jalan-jalan alternatif di beberapa titik, pembangunan jalan arteri baru (pengganti jalan raya Porong) serta pelebaran jalan tol. Perbaikan tersebut terbukti telah menormalkan kembali jalur distribusi barang dan jasa dari Surabaya ke wilayah Jawa Timur bagian selatan dan timur ataupun sebaliknya.

Tabel 3.1. PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Konsumsi Rumah Tangga	70 300,18	78 035,82	84 076,93	92 143,45	98 815,62
2. Konsumsi LNPRT	1 351,67	1 557,54	1 677,81	1 859,98	10958,90
3. Konsumsi Pemerintah	11 371,04	11 871,20	13 215,69	12 612,80	130465,45
4. PMTB	38 642,56	40 983,82	43 723,75	47 498,34	52 057,72
5. Perubahan Inventori	202,96	6 146,60	5 074,72	754,18	1 403,86

6. Ekspor	116 752,14	199 470,11	182 590,12	187 948,81	204 326,94
7. Impor	120 877,29	206 419,27	184 278,12	182 796,92	197 748,41
Total PDRB	**117 743,25**	**131 645,83**	**146 080,89**	**160 020,65**	**174 280,09**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Akhir tahun 2017, Kabupaten Sidoarjo mampu menghasilkan PDRB sebesar 174,2 trilyun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen. Berdasarkan tabel 3.1, nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo ADHB selama periode tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Grafik 3.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017

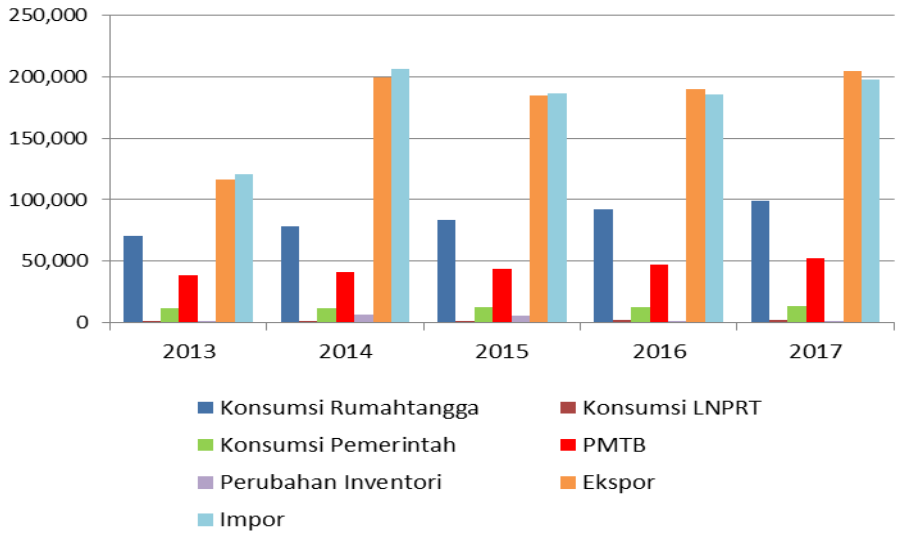

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau adalah berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2013–2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Sidoarjo berdasarkan PDRB ADHK 2010 dapat dilihat pada tabel 3.2. Sama halnya

dengan PDRB ADHB, Nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013-2017

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Konsumsi Rumah Tangga	60 211,55	64 096,25	66 808,57	69 881,72	73 132,28
2. Konsumsi LNPRT	918,16	1 081,04	1 096,26	1 159,40	1 187,34
3. Konsumsi Pemerintah	7 668,84	7 871,35	8 086,51	7 445,10	7 678,13
4. PMTB	34 721,87	35 500,57	37 039,42	38 132,30	40 335,57
5. Perubahan Inventori	181,61	3 743,66	3 476,21	467,82	483,82
6. Ekspor	99 470,22	165 451,47	150 771,20	152 116,73	163 675,04
7. Impor	103 179,73	171 310,05	155 265,31	151 273,87	161 453,128
Total PDRB	**99 992,52**	**106 434,28**	**112 012,86**	**118 179,19**	**125 039,06**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Grafik 3.2. PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017

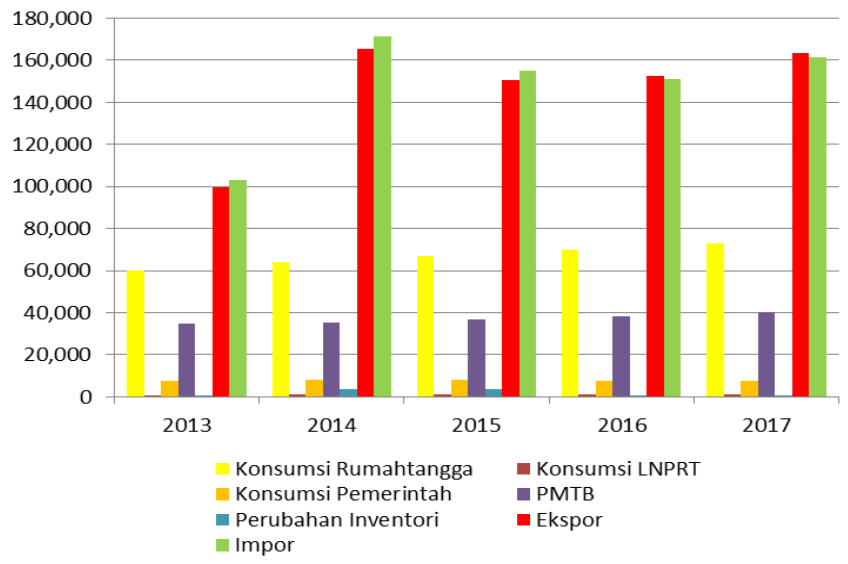

Dari grafik 3.3, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Grafik 3.3. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, (Triliyun rupiah) 2013 – 2017

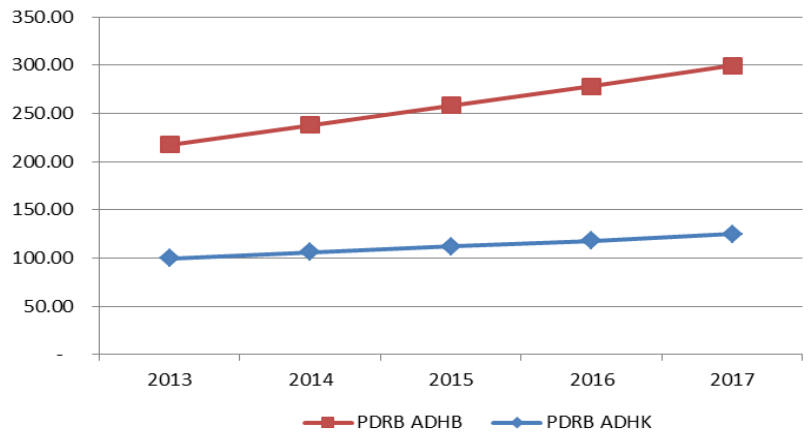

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT(PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013—2017

(persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,71	59,28	57,36	57,41	56,70
2. Konsumsi LNPRT	1,15	1,18	1,15	1,16	1,12
3. Konsumsi Pemerintah	9,66	9,02	8,86	7,88	7,73
4. PMTB	32,82	31,13	29,93	29,68	29,87
5. Perubahan Inventori	0,17	4,67	3,88	0,85	0,81
6. Ekspor	99,16	151,5	126,7	117,8	117,2
7. Impor	102,66	156,8	127,9	115,8	113,5
Total PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2013 – 2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 57-59 persen.

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 30 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7 hingga 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2013-2017 perdagangan internasional Kabupaten Sidoarjo yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung sedikit lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan internasional Kabupaten Sidoarjo dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi surplus atau menguntungkan.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013 s.d 2017 mengalami fluktuasi. Seperti yang tertera di tabel 3.4. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,89 persen, sebaliknya terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,24 persen.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013—2017

(persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,78	6,45	4,23	4,60	4,65
2. Konsumsi LNPRT	12,68	17,74	1,41	5,76	2,41
3. Konsumsi Pemerintah	8,59	2,64	2,73	(7,93)	3,13
4. PMTB	3,40	2,24	4,33	2,95	5,78
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	6,9	66,3	(8,9)	1,1	7,4
7. Impor	6,6	66,0	(9,4)	(2,6)	6,7
Total PDRB	**6,89**	**6,44**	**5,24**	**5,51**	**5,80**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Grafik 3.4. Pertumbuhan Komponen PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran (persen) 2013 – 2017

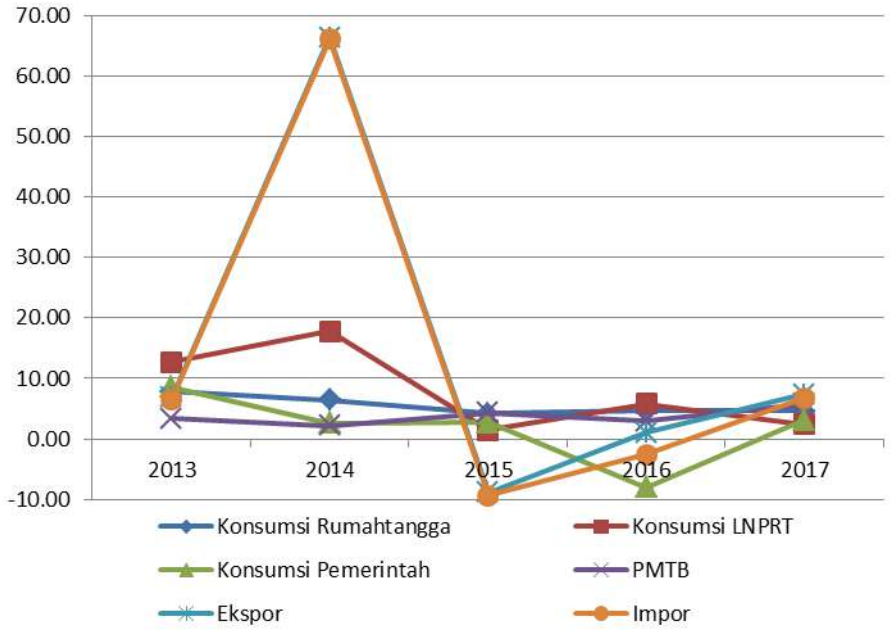

Sementara itu, indeks implisit[1] PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Sidoarjo Menurut Pengeluaran, 2013 - 2017

(persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Konsumsi Rumah Tangga	116,76	121,75	125,43	131,46	135,12
2. Konsumsi LNPRT	147,22	144,08	153,05	160,43	164,98
3. Konsumsi Pemerintah	148,28	150,82	159,97	169,41	175,37
4. PMTB	111,29	115,45	118,05	124,56	129,06
5. Perubahan Inventori	111,76	164,19	163,24	289,47	290,16
6. Ekspor	117,40	120,60	122,70	124,78	124,84
7. Impor	117,20	120,50	120,30	122,49	122,48
Total PDRB	**117,75**	**123,69**	**130,41**	**135,41**	**139,38**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

[1] *Indeks perkembangan*

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Berdasarkan tabel 3.6, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK 2010), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 s.d 2017 terus melambat. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 59,71 persen dan terus melambat hingga tahun 2017, yaitu 56,70 persen.

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	70 300,18	78 035,82	83 796,93	91 863,45	98 815,62
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	60 211,55	64 096,25	66 808,57	69 881,72	73 132,28
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	59,71	59,28	57,36	57,41	56,70
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB 2010	34 309,74	37 446,58	39 577,65	42 717,61	45 251,84
b. ADHK 2010	29 388,02	30 757,48	31 553,97	32 495,84	33 490,35
Pertumbuhan[2]					
a. Total konsumsi RT	7,78	6,45	4,23	4,60	4,65
b. Perkapita	6,09	4,67	2,59	2,98	3,06
Jumlah penduduk *(000 org)*	2 049	2 084	2 117	2 150	2184

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

[2] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

Tahun 2017 iklim perekonomian yang kondusif telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya. Peningkatan penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor), juga turut menjadi pendorong meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, nilai konsumsi akhir rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013, rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo menghabiskan dana sekitar 70,3 trilyun rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 78 trilyun rupiah (2014) dan 84 trilyun rupiah (2015). Pada tahun 2017, nilai konsumsi akhir rumah tangga telah melewati angka 98 trilyun rupiah.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Sidoarjo meningkat, baik secara kuantitas *(volume)* maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, berdasarkan PDRB ADHK 2010, total konsumsi rumah tangga selama periode 2013 s.d 2017 tumbuh pada kisaran 4 - 7 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,78 persen. Tahun 2014 pertumbuhan total konsumsi rumah tangga mulai melambat sebesar 6,45 persen. Perlambatan ini terus berlangsung hingga tahun 2017 mencapai titik 4,65 persen.

Pada sisi lain, pertumbuhan konsumsi per-kapita juga megikuti pola yang sama dengan total konsumsi rumah tangga; beriringan searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2013 pertumbuhan konsumsi per-kapita sebesar 6,09 persen dan terus melambat hingga tahun 2017 sebesar 3,06 persen.

Terlihat bahwa mulai tahun 2014 masyarakat Sidoarjo mulai mengurangi proporsi pengeluaran rumah tangga dan dialokasikan untuk lainnya, misalnya investasi atau tabungan.

Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Secara umum konsumsi makanan selama 5 tahun terakhir berkisar 40 persen terhadap total konsumsi.

Terjadi proses saling tarik-menarik kepentingan dan prioritas menyebabkan proporsi konsumsi makanan selama periode 5 tahun terakhir cenderung terus menurun. Pada tahun 2013 proporsinya sebesar 37,5 persen; 36,5 persen (2014) ; 36,1 persen (2015) ; 35,8 persen (2016) dan 35,4 persen (2017).

Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017[3]

(persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	37,5	36,5	36,1	35,8	35,4
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,8	13,9	13,9	13,7	13,6
d. Kesehatan & Pendidikan	9,4	9,1	9,5	9,6	9,7
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	21,8	22,9	23,1	23,4	23,7
f. Hotel dan Restoran	8,5	8,7	8,8	8,9	8,8
g. Lainnya	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7
Total Konsumsi	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Berbanding terbalik dengan proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan yang terus menurun, proporsi pengeluaran masyarakat yang cederung naik adalah pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan serta transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya.

Sebelum tahun 2011, poporsi pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masih di bawah 9 persen. Setelah tahun 2013 paradigma masyarakat mulai terbuka akan pentingnya kesehatan dan pendidikan, sehingga proporsi pengeluaran sub kelompok ini sampai akhir tahun 2017 mencapai 9,7 persen. Begitu pula transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Pada tahun 2013 proporsinya berkisar di angka 21 persen; dan tahun 2017 proporsinya beranjak naik, lebih dari 23 persen.

[3]*Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)*

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan adanya pergeseran proporsi antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Semakin maju suatu wilayah, semakin besar alokasi konsumsi non makanan masyarakat. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

(persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,1	4,1	2,1	2,9	3,4
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,2	7,6	3,6	4,1	4,7
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,4	7,0	5,4	5,5	4,8
d. Kesehatan & Pendidikan	9,4	5,6	5,3	6,5	4,8
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	10,2	9,7	8,9	5,9	6,4
f. Hotel dan Restoran	6,9	7,6	3,3	3,9	3,8
g. Lainnya	7,0	6,4	2,0	5,0	5,0

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok mengalami perlambatan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2013-2014 pertumbuhan kelompok konsumsi ini stabil sebesar 4,1 persen. Di tahun 2016, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok konsumsi ini melambat sebesar 2,9 persen. Tahun 2017, pengeluaran rumah tangga utuk kelompok konsumsi mengalami peningkatan sebesar 3,6 persen.

Pada tahun 2013, laju pertumbuhan tertinggi pada sub kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 14,4 persen. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan tertinggi bergeser pada sub kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang melaju cepat sebesar 9,7 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan tertinggi ada pada sub kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang hanya tumbuh sebesar 8,9 persen. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 laju pertumbuhan pada tiap sub kelompok makanan tidak secepat tahun-tahun sebelumnya; cenderung lebih merata pada tiap kelompok konsumsi.

Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017[4]

(persen)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,3	4,0	4,1	5,4	3,3
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,0	0,1	0,1	5,2	3,3
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,5	4,5	1,6	2,7	2,0
d. Kesehatan & Pendidikan	3,9	2,2	6,3	4,3	3,9
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,8	6,4	1,0	4,7	2,4
f. Hotel dan Restoran	8,8	5,0	5,3	6,6	3,3
g. Lainnya	2,3	4,3	2,3	5,4	3,2

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.9, menunjukkan secara umum peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Perubahan harga barang dan jasa konsumsi rumahtangga terlihat tidak besar, bahkan terlihat lebih stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Pada tahun 2017 kelompok konsumsi yang mengalami perubahan harga pada tiap sub kelompok makanan tidak secepat tahun-tahun sebelumnya; cenderung lebih merata pada tiap kelompok konsumsi.

[4]*Tingkat perubahan harga produk konsumsi*

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peran konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran kurang signifikan dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB yang kecil.

Berdasarkan tabel 3.10, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi LNPRT pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan. Namun proporsi terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo cenderung stabil, sekitar 1 persen.

Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	1 351,67	1 557,54	1 677,81	1 859,98	1 958,90
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	918,16	1 081,04	1 096,26	1 159,40	1 187,34
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	1,15	1,18	1,15	1,16	1,12
Pertumbuhan	12,68	17,74	1,41	5,76	2,41

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Bila dilihat dari pendapatan riil, maka konsumsi LNPRT ADHK pada tahun 2013 sebesar 918 milyar rupiah atau tumbuh sebesar 1,15 persen dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2016, konsumsi LNPRT mengalami kenaikan hingga 1,16 persen atau sebesar 1,8 trilyun rupiah. Namun pada tahun 2017 proporsi LNPRT mengalami penurunan, sebesar 1,12 persen atau sebesar 1,9 triliyun rupiah.

Selama 5 tahun terakhir komponen ini tidak mengalami perubahan yang besar. Kegiatan pada komponen LNPRT tidak banyak berkembang dan cenderung stagnan. Pemerintah telah memberikan suntikan dana untuk mendukung kegiatan LNPRT, akan tetapi pembiayaan sebagian besar dari lembaga atau rumahtangga membuat komponen ini “tarik menarik” dengan komponen konsumsi rumahtangga.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	11 371,04	11 871,20	12 935,69	12 612,81	13 465,45
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	7 668,84	7 871,35	8 086,51	7 445,10	7 678,13
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	9,66	9,02	8,86	7,88	7,73
Konsumsi Pemerintah per- kapita *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	5 549,59	5 696,56	6 109,58	5 865,11	6 166,40
b. ADHK 2010	3 742,75	3 777,18	3 819,29	3 462,06	3 516,14
Pertumbuhan[5]					
a. Total konsumsi pemerintah	8,59	2,64	2,73	(7,93)	3,13
b. Konsumsi pemerintah perkapita	6,89	0,92	1,11	(9,35)	1,56
Jumlah penduduk *(000 org)*	2 049	2 084	2 117	2 150	2184

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 11,3 trilyun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 13,5 trilyun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

[5] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)*

Kontribusi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus menurun. Selama empat tahun terakhir, kontribusi komponen ini berkisar di angka 7-9 persen. Pada tahun 2013-2015 stabil pada kisaran 9 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif. Akan tetapi pada tahun 2016 kontribusi komponen ini menurun sebesar 7,88 persen. Pada tahun 2017 terjadi kontribusi terendah seiktar 7,73 daripada tahun tahun sebelumnya. Penurunan ini berkaitan dengan adanya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di sepanjang tahun.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita.

Nilai konsumsi pemerintah ADHB menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut mengidentifikasikan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita ADHB sebesar 11,4 trilyun rupiah, dan terus meningkat hingga di tahun 2017 sebesar 13,5 trilyun rupiah.

Pada sisi yang lain terlihat pertumbuhan total konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2013, sebesar 8,59 persen. Pada tahun 2014-2015 kinerja total konsumsi pemerintah mulai melambat; dimana pertumbuhan total konsumsi pemerintah berkisar 2 persen. Penghematan dan efisiensi anggaran dalam kegiatan pemerintahan di tahun 2016 membuat pertumbuhan total konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,93 persen. Dan pada tahun 2017 kinerja total konsumsi pemeritahan mulai membaik dan meningkat sekitar 3,13 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah per-kapita secara “riil” menunjukkan seberapa besar pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah per-kapita tertinggi di tahun 2013 sebesar 6,89 persen. Kinerja komponen ini terus melambat di tahun 2014 dan di tahun 2015 yang hanya tumbuh sekitar 1 persen. Pada tahun 2016 komponen ini mengalami kontraksi, sebesar 9,43 persen. Efisiensi yang diterapkan memicu penurunan realisasi belanja operasional tahun 2016. Hal ini terlihat di tabel 3.11. Kemudian pada tahun 2017 mulai menunjukkan peningkatan sebesar 1,6 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[6]. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Proporsi total PMTB terhadap PDRB meningkat pada tahun 2017 setelah terus menurun selama tahun 2013-2017. Pada tahun 2013-2014 proporsi komponen ini masih terjaga di atas 30 persen, namun mulai tahun 2015 proporsi komponen ini terus turun tidak mencapai 30 persen. Peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 hanya 0,2 persen.

Akan tetapi di tabel 3.12 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berfluktuasi. Pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 3,4 persen kemudian melambat sebesar 2,2 persen pada tahun 2014. Baru setelah tahun 2015 pertumbuhan pembentukan PMTB kembali menguat sebesar 4,43 persen. Di tahun 2016 kinerja komponen ini kembali melambat sebesar 2,95 persen. Dan pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 5,78 dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung menurun tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan. Kinerja yang baik pada sub komponen bangunan tahun 2017 berupa pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah dan didukung pembangunan pusat bisnis di arteri Porong-Sidoarjo. Kinerja sub komponen non bangunan berupa pembelian barang modal berupa mesin, kendaraan dan alat elektronik.

[6] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

Tabel 3.12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	38 642,56	40 983,83	43 723,75	47 498,34	52 057,72
b. ADHK (Miliar Rp)	34 721,87	35 500,57	37 039,42	38 132,30	40 335,57
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	32,82	31,13	29,93	29,68	29,87
Struktur PMTB [7]					
a. Bangunan (*Miliar Rp*)	23 312,06	24. 915,66	26 109,32	28 791,80	31 268,28
(%)	*60,3*	*60,8*	*59,7*	*60,6*	*60,1*
b. Non Bangunan (*Miliar Rp*)	15 330,50	16 068,16	17 614,43	18 706,54	20 789,43
(%)	*39,7*	*39,2*	*40,3*	*39,4*	*39,9*
Total PMTB *(Miliar Rp)*	38 642,56	40 983,83	43 723,75	47 498,34	52 057,72
(%)	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*
Pertumbuhan[8] (%)					
a, Bangunan	3,73	1,19	4,19	3,09	5,01
b. Non Bangunan	2,92	3,76	4,54	2,76	6,86
Total PMTB	3,40	2,24	4,33	2,95	5,78

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Proporsi PMTB pada sub komponen bangunan dan non bangunan terhadap total PMTB terlihat stabil selama tahun 2013-2017, seperti yang disajikan dalam tabel 3.12. Proporsi sub komponen bangunan berkisar 60 persen dan non bangunan berkisar 40 persen. Sedikit fluktuasi yang terjadi pada proporsi masing-masing sub komponen tidak lepas dari pengaruh pertumbuhannya.

Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan pada tahun 2013, yaitu sebesar 3,7 persen. Di tahun 2014 mulai melambat sebesar 1,19 persen. Pada tahun 2015 -2017 sub komponen ini menguat lagi sebesar 4,19 persen; 3,09 persen; dan 5,01 persen. Pola pertumbuhan pada sub komponen sub non bangunan identik dengan sub komponen bangunan.

[7] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)*
[8] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

Grafik 3.5. Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017

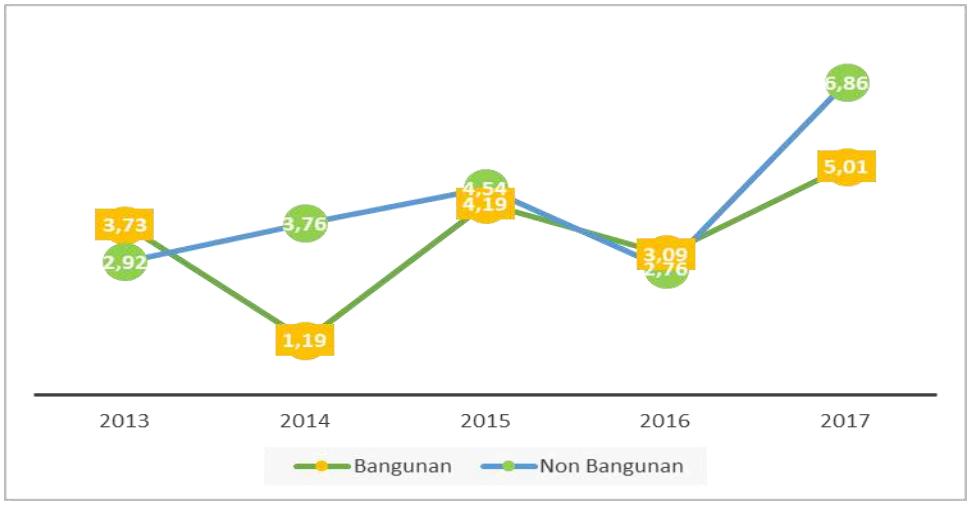

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi.

Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	202,96	6 146,60	5 074,72	1 354,18	1 403,86
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	181,61	3 743,66	3 476,21	467,82	483,82
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,17	4,67	3,88	0,85	0,81

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2013 nilai perubahan inventori sebesar 202,9 milyar rupiah atau menyumbang sebesar 0,17 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2014-2015 terjadi penumpukan persediaan barang yang cukup besar, mencapai 6 trilyun rupiah (2014) dan 5 trilyun rupiah (2015). Proporsinya mencapai 4,67 persen (2014) dan 3,47 persen (2015). Terlihat bahwa pada akhir tahun 2014 dan 2015 melimpahnya barang yang tersedia tidak sepenuhnya dikonsumsi masyarakat, pemerintah dan swasta.

Pada tahun 2016-2017 penyerapan barang yang diproduksi lebih baik dari tahun sebelumnya. Nilai perubahan inventori sebesar 1,3 trilyun rupiah (2016) dan 1,4 triliyun rupiah (2017) atau menyumbang sekitar 0,8 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar Kabupaten Sidoarjo, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Sebagai daerah sentra industri (baik industri besar sedang maupun UMK), Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten produsen barang untuk diekspor baik ke luar kabupaten maupun luar negeri. Secara total, nilai ekspor tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	116 752,14	199 470,11	185 050,12	190 128,81	204 326,94
b. ADHK (Miliar Rp)	99 470,22	165 451,47	150 771,20	152 366,73	163 675,04
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	99,16	151,5	126,7	118,8	117,2
Pertumbuhan[9] (%)	6,9	66,3	(8,9)	1,1	7,4

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2013 nilai ekspor Kabupaten Sidoarjo mencapai 116 trilyun rupiah. Tahun 2014 nilai ekspor mencapai 199 milyar rupiah. Peningkatan nilai ekspor yang cukup besar ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya : modal yang ditanam para investor semakin banyak seiring dengan tingginya kepercayaan investor terhadap perusahaan industri Sidoarjo serta semakin mudahnya administrasi dan peraturan pemerintah terhadap proses ekspor ke luar negeri.

Nilai ekspor tahun 2015 dan tahun 2016 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya, stabil di kisaran 185-190 triliyun rupiah. Nilai ekspor tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 204,8 triliyun. Investasi yang memadai diperlukan untuk memacu perekonomian dari sektor ekspor Kabupaten Sidoarjo. Dari data 6 tahun terakhir di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sidoarjo, tercatat bahwa trend investasi di wilayah ini mengalami peningkatan yang signifikan; yaitu dari 5,32 triliun (2011) menjadi 13,83 triliun (2013) dan meningkat lagi menjadi 17,88 triliun (2017).

Meskipun secara nominal nilai ekspor sangat besar dan terus naik tiap tahun, tetapi pertumbuhannya terlihat fluktuatif. Mulai tahun 2013 pertumbuhan ekspor mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang dan jasa sehingga memicu pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 66,3 persen. Pada tahun 2015 kinerja ekspor mulai melambat lagi dan mengalami kontraksi sebesar -8,9 persen. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan negara-negara mitra dagang serta penurunan harga komoditas internasional, karena

[9] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

perusahaan besar di Sidoarjo sebagian besar berorientasi ekspor luar negeri. Kontraksi perdagangan antardaerah diindikasikan terkait dengan melambtanya perekonomian wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Mulai Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 kinerja ekspor pulih kembali. Stabilitas perekonomian yang baik mendorong investor untuk kembali menanamkan modal di Sidoarjo. Begitu pula kinerja ekspor luar negeri meningkat seiring dengan tingginya permintaan negara-negara mitra dagang utama, yaitu Jepang, Amerika Serikat dan Tiongkok.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Tabel 3.15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Nilai Impor					
a, ADHB (Miliar Rp)	120 877,29	206 419,27	186 778,12	185 296,92	197 748,41
b, ADHK (Miliar Rp)	103 179,73	171 310,05	155 265,31	151 273,87	161 453,13
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	102,33	156,8	127,9	115,8	113,5
Pertumbuhan[10] (%)	6,6	66,0	(9,4)	(2,6)	6,7

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

[10] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Sidoarjo di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.15 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan nilai impor Kabupaten Sidoarjo pada periode tahun 2013 s.d 2017 cenderung meningkat (baik ADHB maupun ADHK 2010). Nilai impor tahun 2013 sebesar 120 trilyun rupiah. Nilai impor ini terus meningkat, hingga di tahun 2014 nilai impor mencapai 2 kali lipat dari tahun 2013. Pada tahun 2015-2016 nilai impor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, berkisar sekitar 185 trilyun rupiah. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 197 triliyun rupiah.

Tidak jauh berbeda dengan ekspor; meskipun secara nominal nilai impor mengalami peningkatan tetapi pertumbuhannya terhadap PDRB cenderung fluktuatif. Tahun 2013 kinerja riil komponen ini mengalami peningktan sebesar 6,6 persen. Seiring dengan nilai impor yang naik drastis, maka di tahun 2014 pertumbuhan komponen ini mencapai 66 persen.

Kontraksi kembali terjadi di tahun 2015-2016 dengan adanya kebijakan pengurangan impor, sebesar -9,4 persen (2015) dan -2,6 persen (2016). Pelemahan impor luar negeri tahun 2015 disebabkan karena melambatnya kinerja sektor industri pengolahan sejalan dengan melambatnya permintaan global dan domestik diiringi nilai tukar rupiah yang masih terdepresiasi.

Peningkatan kinerja impor tahun 2016 dipengaruhi oleh apresiasi nilai tukar rupiah didukung permintaan domestik yang meningkat. Kondisi nilai tukar rupiah yang membaik memberikan kemudahan bagi pelaku usaha industri pengolahan untuk mengimpor bahan baku.

Pada tahun 2017 kinerja impor kembali menguat, mampu tumbuh sebesar 6,7 persen atau sekitar 197 triliyun. Akselerasi kinerja impor Kabupaten Sidoarjo seiring dengan peningkatan permintaan konsumsi rumahtangga, investasi dan dan perdagangan antar daerah.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda **"positif"** berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Grafik 3.6. Perbandingan Pertumbuhan Ekspor dan Impor Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017 (persen)

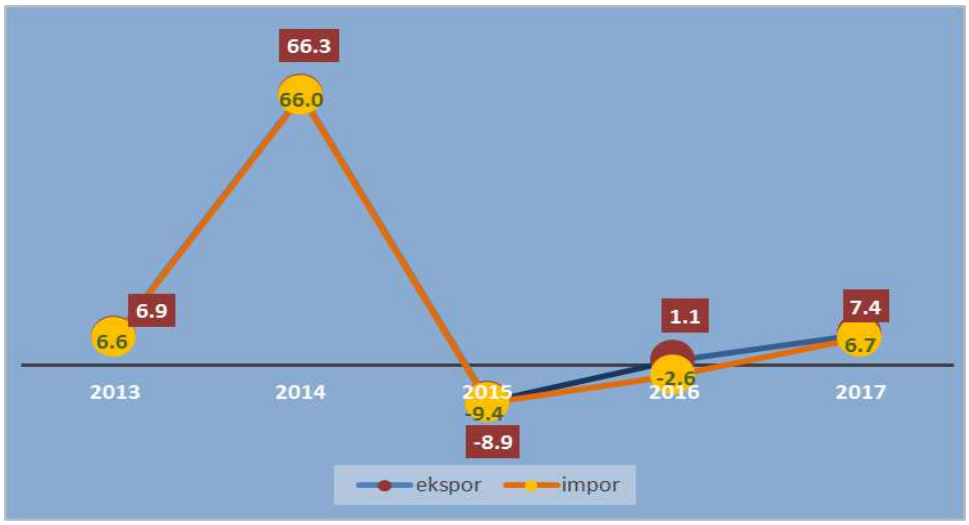

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan

metode*cross hauling.* Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand)* dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian.

Penghitung ekspor impor dengan metode*cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance.* Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang *(balancing item)* dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Perkembangan Agregat PRDB Pengeluaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Perkapita
Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	117 743,25	131 645,83	146 080,89	160 020,65	174 280,09
- ADHK 2010	99 992,52	106 434,28	112 012,86	118 179,19	125 039,06
PDRB perkapita (ribu Rp)					
- ADHB	57 464,16	63 172,09	68 994,63	74 411,53	79 810,20
- ADHK 2010	48 800,98	51 073,98	52 904,13	54 954,74	57 260,65
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	5,22	4,66	3,58	3,88	4,20
Jumlah Penduduk (000 org)	2 049	2 084	2 117	2 150	2 184
Pertumbuhan	1,59	1,71	1,60	1,57	1,54

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB per-kapita Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel 4.1, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Sidoarjo rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Sidoarjo secara "riil" melambat selama kurun waktu 2013-2015. Tahun 2016-2017, PDRB perkapita mulai naik sebesar 3,88 dan 4,20 persen. Walaupun pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Sidoarjo sempat melambat, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk tiap tahunnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk masih stabil pada kisaran 1,5 – 1,7 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB Kabupaten Sidoarjo (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Kabupaten Sidoarjo untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	70 300,18	78 035,82	83 796,93	91 863,45	98 815,62
Total Ekspor (ADHB) *(Miliar Rp)*	116 752,14	199 470,11	185 050,12	190 128,81	204 326,94
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,60	0,39	0,45	0,48	0,48

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, produk yang diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi rumah tangga sekitar 0,6 kali dari yang diekspor. Hal ini

berarti penyediaan *(supply)* domestik sangat berlimpah, sehingga sebagian besar digunakan untuk ekspor. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai rasio relatif sama yaitu dalam rentang 0,39 - 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan proporsi barang yang diekspor daripada yang dikonsumsi rumahtangga pada tahun 2014-2017. Peningkatan ekspor ini disebabkan melimpahkan produksi barang dan tingginya permintaan dari luar negeri.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio PDRB Konsumsi Rumah tangga terhadap PMTB merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	70 300,18	78 035,82	83 796,93	91 843,45	98 815,62
Total PMTB (ADHB) *(Miliar Rp)*	38 642,56	40 983,83	43 723,75	47 498,34	52 057,72
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,82	1,90	1,92	1,93	1,90

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sekilas nampak bahwa sebagian besar pengeluaran produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Sidoarjo digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB terlihat stabil, periode 2013 sampai 2017 berada pada kisaran 1,9. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk konsumsi akhir rumah tangga hampir 2 kali lipat dari nilai investasi fisik yang ditanam.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun

ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Konsumsi Akhir (ADHB) (*Miliar Rp*)					
a. Rumah tangga	70 300,18	78 035,82	83 796,93	91 863,45	98 815,62
b. LNPRT	1 351,67	1 557,54	1 677,81	1 859,98	1 958,90
c. Pemerintah	11 371,04	11 871,20	12 935,69	12 612,81	13 465,45
Jumlah	83 022,88	91 464,56	98 410,43	106 326,29	114 239,97
PDRB (ADHB) (*Miliar Rp*)	117 743,25	131 645,83	146 080,89	160 020,65	174 280,09
Proporsi	70,51	69,48	67,37	66,45	65,55

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Selama 5 tahun terakhir, sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah). Proporsi total konsumsi akhir terus melambat, bahkan mulai tahun 2014 tidak mencapai 70 persen, meskipun nilai konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang besar.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB ADHB Kabupaten Sidoarjo 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Ekspor (ADHB) *(Miliar Rp)*	116 752,14	199 470,11	185 050,12	190 128,81	204 326,94
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	38 642,56	40 983,83	43 723,75	47 498,34	52 057,72
Rasio Ekspor terhadap PMTB	3,02	4,87	4,23	4,00	3,93

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Pada periode 2013-2017, secara umum terlihat bahwa nilai produk yang diekspor lebih besar daripada nilai produk yang digunakan untuk menjadi capital. Selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa nilai ekspor mempunyai nilai 3-4 kali lipat terhadap PMTB. Pada tahun 2013 rasio ekspor terhadap PMTB berkisar 3 kali. Rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Keseimbangan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif setara dengan kecepatan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio PDRB terhadap Impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rasio PDRB terhadap impor kurun waktu 2013–2017 terlihat stabil setiap tahunnya. Rasio berkisar dari angka 0,7 sampai dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai impor relatif lebih cepat dibandingkan peningkatan PDRB. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	117 743,25	131 645,83	146 080,89	160 020,65	174 280,09
Total Impor (ADHB) *(Miliar Rp)*	120 877,29	206 419,27	186 778,12	185 296,92	197 748,41
Rasio PDRB terhadap Impor	0,97	0,64	0,78	0,86	0,88

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Sidoarjo, 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	117 743,25	131 645,83	146 080,89	160 020,65	174 280,09
%	*49,34*	*38,94*	*3,89*	*46,34*	*46,85*
Total nilai Impor ADHB *(Miliar Rp)*	120 877,29	206 419,27	186 778,12	185 296,92	197 748,41
%	*50,66*	*61,06*	*56,11*	*53,66*	*53,15*
Total Permintaan Akhir[1] *(Miliar Rp)*	238 620,54	338 065,10	332 859,01	345 317,57	372 028,50
%	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel 4.7, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian besar produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan daerah lain tiap tahunnya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 50 persen dari selisih

[1] *Termasuk diskrepansi statistik*

hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 238 trilyun rupiah pada tahun 2013 menjadi sebesar 372 trilyun rupiah pada tahun 2017.

Di sisi lain "penyediaan" produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik pada tahun 2013 sebesar 117 trilyun rupiah; 131 trilyun rupiah (2014); 146 trilyun rupiah (2015); 160 trilyun rupiah (2016); dan 174 triliyun rupiah (2017). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 120 trilyun rupiah (2013); 206 trilyun rupiah (2014); 186 trilyun rupiah (2015); 185 trilyun rupiah (2016); dan 197 triliyun rupiah (2017).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) serta dari daerah lain dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **"Ekspor Neto"**,apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Sebagai kabupaten penghasil produk barang dan jasa, bahan baku yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan domestik. Selama 5 tahun terakhir dalam proses menghasilkan produk domestik, baik yang digunakan sendiri maupun untuk diekspor; Kabupaten Sidoarjo menggunakan bahan impor sangat besar, bahkan hampir senilai dengan produk akhir yang diekspor ke luar daerah.

Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Sidoarjo 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Nilai Ekspor (ADHB) *(Miliar Rp)*	116 752,14	199 470,11	185 050,12	190 128,81	204 326,94
Nilai Impor (ADHB) *(Miliar Rp)*	120 877,29	206 419,27	186 778,12	185 296,92	197 748,41
Net ekspor (X – M) *(Miliar Rp)*	(4 125,15)	(6 949,16)	(1 728)	4 831,89	6 578,53
Rasio ekspor thdp Impor	0,97	0,97	0,99	1,03	1,03

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Selama 5 tahun terakhir angka rasio ekspor terhadap impor berkisar 1. Hal ini merefleksikan bahwa nilai ekspor sebanding dengan nilai impor.

Nilai net ekspor terhadap impor selama tahun 2013-2015 menunjukkan nilai negatif. Hal ini merefleksikan selama periode tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sidoarjo masih banyak menggunakan produk barang dan jasa dari daerah lain.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.9. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Sidoarjo, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	99 992,52	106 434,28	112 012,86	118 179,19	125 039,06
Perubahan (miliar rupiah)	6 448,65	6 441,76	5 578,58	6 166,33	6859,87
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	34 721,87	35 500,57	37 039,42	38 132,30	40 335,57
ICOR	5,38	5,51	6,64	6,18	5,88

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4.10 menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir periode 2013 – 2017 terlihat naik. Pada periode 2013 – 2014 besaran ICOR masih berada kisaran 5 persen. Pada tahun 2015 – 2016 besaran ICOR mulai menyentuh angka 6 persen. ICOR tertinggi pada tahun 2015. Secara parsial, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo kurang efisien pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2017, besaran ICOR kembali turusn, sebesar 5,88 persen.

Semakin tinggi nilai ICOR menandakan bahwa kegiatan penanaman modal relatif kurang efisien karena untuk meningkatkan output diperlukan penambahan investasi yang lebih banyak. Kurang efektifnya pembentukan modal tahun 2017 di Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena pembentukan modal yang dilakukan pada tahun 2017 belum membuahkan hasil pada tahun tersebut.

Penutup

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.

2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Sidoarjo terhadap ekonomi negara dan daerah lain.

Lampiran

Lampiran 1

Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017

Juta Rupiah

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70 300 179,9	78 035 822,7	83 796 927,1	91 863 451,0	98 815 620,6
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	26 333 174,3	28 495 470,6	30 274 681,6	32 847 804,8	34 989 886,8
	b. Pakaian dan Alas Kaki	3 730 919,1	4 015 099,2	4 162 631,9	4 562 117,0	4 934 142,6
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapandan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9 698 398,9	10 842 593,6	11 606 654,8	12 573 322,2	13 443 147,1
	d. Kesehatan dan Pendidikan	6 599 570,2	7 124 479,8	7 970 434,8	8 849 911,3	9 634 457,8
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	15 304 845,5	17 855 593,4	19 358 317,4	21 482 529,8	23 401 277,8
	f. Hotel dan Restoran	5 978 779,2	6 757 011,5	7 351 317,4	8 146 353,1	8 729 061,8
	g. Lainnya	2 654 492,7	2 945 574,5	3 072 889,1	3 401 412,9	3 683 646,8
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1 351 665,7	1 557 543,5	1 677 812,1	1 859 982,7	1 958 904,9
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11 371 038,5	11 871 197,2	12 935 688,9	12 612 805,5	13 465 453,4
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	38 642 558,6	40 983 825,3	43 723 747,3	47 498 340,7	52 057 716,1
	a. Bangunan	23 312 057,2	24 915 663,9	26 109 319,8	28 791 802,6	31 268 284,0
	b. Non-Bangunan	15 330 501,4	16 068 161,5	17 614 427,5	18 706 538,1	20 789 432,1
5	Perubahan Inventori	202 962,2	6 146 599,3	5 674 721,5	1 354 184,4	1 403 858,7
6	Ekspor	116 752 135,6	199 470 110,5	185 050 117,5	190 128 812,3	204 326 942,7
7	Impor	120 877 289,0	206 419 270,5	186 778 124,7	185 296 923,3	197 748 408,8
	PDRB	**117 743 251,5**	**131 645 828,1**	**146 080 889,7**	**160 020 653,4**	**174 280 087,6**

Lampiran 2

Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017

Juta Rupiah

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60 211 550,8	64 096 252,7	66 808 566,4	69 881 724,9	73 132 282,8
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	22 139 499,3	23 038 103,7	23 523 194,5	24 212 907,1	25 044 441,4
	b. Pakaian dan Alas Kaki	3 158 136,8	3 396 913,9	3 519 454,2	3 665 159,6	3 838 521,7
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8 676 669,9	9 281 032,0	9 778 219,7	10 318 295,5	10 815 981,8
	d. Kesehatan dan Pendidikan	5 274 873,8	5 569 695,7	5 862 169,4	6 242 351,1	6 541 624,9
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	13 816 064,5	15 150 366,0	16 246 328,9	17 226 479,9	18 333 471,4
	f. Hotel dan Restoran	4 729 700,8	5 090 068,0	5 257 273,9	5 463 247,3	5 668 119,0
	g. Lainnya	2 416 605,7	2 570 073,5	2 621 925,9	2 753 284,3	2 890 122,6
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	918 156,6	1 081 037,6	1 096 258,6	1 159 403,1	1 187 344,7
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7 668 844,0	7 871 352,1	8 086 508,8	7 445 095,6	7 678 127,1
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	34 721 870,2	35 500 567,5	37 039 415,3	38 132 296,9	40 335 571,8
	a. Bangunan	20 484 638,5	20 728 148,3	21 596 670,9	22 263 075,6	23 378 455,7
	b. Non-Bangunan	14 237 231,7	14 772 419,1	15 442 744,5	15 869 221,3	16 957 116,1
5	Perubahan Inventori	181 612,8	3 743 657,2	3 476 213,4	467 816,2	483 815,5
6	Ekspor	99 470 217,4	165 451 472,0	150 771 202,5	152 366 727,2	163 675 042,1
7	Impor	103 179 729,9	171 310 054,4	155 265 305,4	151 273 874,1	161 453 127,7
	PDRB	**99 992 521,9**	**106 434 284,6**	**112 012 859,7**	**118 179 189,9**	**125 039 056,4**

Lampiran 3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017

persen

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,71	59,28	57,36	57,41	56,70
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	22,36	21,65	20,72	20,53	20,08
	b. Pakaian dan Alas Kaki	3,17	3,05	2,85	2,85	2,83
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,24	8,24	7,95	7,86	7,71
	d. Kesehatan dan Pendidikan	5,61	5,41	5,46	5,53	5,53
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	13,00	13,56	13,25	13,42	13,43
	f. Hotel dan Restoran	5,08	5,13	5,03	5,09	5,01
	g. Lainnya	2,25	2,24	2,10	2,13	2,11
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,15	1,18	1,15	1,16	1,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,66	9,02	8,86	7,88	7,73
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,82	31,13	29,93	29,68	29,87
	c. Bangunan	19,80	18,93	17,87	17,99	17,94
	d. Non-Bangunan	13,02	12,21	12,06	11,69	11,93
5	Perubahan Inventori	0,17	4,67	3,88	0,85	0,81
6	Ekspor	99,16	151,5	126,7	118,8	117,2
7	Impor	102,66	156,8	127,9	115,8	113,5
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Lampiran 4

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017

persen

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,78	6,45	4,23	4,60	4,65
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	4,06	4,06	2,11	2,93	3,43
	b. Pakaian dan Alas Kaki	6,18	7,56	3,61	4,14	4,73
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,43	6,97	5,36	5,52	4,82
	d. Kesehatan dan Pendidikan	9,43	5,59	5,25	6,49	4,79
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	10,25	9,66	7,23	6,03	6,43
	f. Hotel dan Restoran	6,95	7,62	3,28	3,92	3,75
	g. Lainnya	7,03	6,35	2,02	5,01	4,97
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,68	17,74	1,41	5,76	2,41
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,59	2,64	2,73	-7,93	3,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,40	2,24	4,33	2,95	5,78
	e. Bangunan	3,73	1,19	4,19	3,09	5,01
	f. Non-Bangunan	2,92	3,76	4,54	2,76	6,86
5	Perubahan Inventori	1 713,67	1 961,34	-7,14	-86,54	3,42
6	Ekspor	6,9	66,3	-8,9	1,1	7,4
7	Impor	6,6	66,0	-9,4	-2,6	6,7
	PDRB	**6,89**	**6,44**	**5,24**	**5,51**	**5,80**

Lampiran 5

Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017

persen

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	116,76	121,75	125,43	131,46	135,12
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	118,94	123,69	128,70	135,66	139,71
	b. Pakaian dan Alas Kaki	118,14	118,20	118,27	124,47	128,54
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	111,78	116,83	118,70	121,85	124,29
	d. Kesehatan dan Pendidikan	125,11	127,92	135,96	141,77	147,28
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	110,78	117,86	119,16	124,71	127,64
	f. Hotel dan Restoran	126,41	132,75	139,83	149,11	154,00
	g. Lainnya	109,84	114,61	117,20	123,54	127,46
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	147,22	144,08	153,05	160,43	164,98
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	148,28	150,82	159,97	169,41	175,37
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	111,29	115,45	118,05	124,56	129,06
	g. Bangunan	113,80	120,20	120,90	129,33	133,75
	h. Non-Bangunan	107,68	108,77	114,06	117,88	122,60
5	Perubahan Inventori	111,76	164,19	163,24	289,47	290,16
6	Ekspor	117,4	120,6	122,7	124,78	124,84
7	Impor	117,2	120,5	120,3	122,49	122,48
	PDRB	**117,75**	**123,69**	**130,41**	**135,41**	**139,38**

Lampiran 6

Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Sidoarjo menurut Pengeluaran, 2013-2017

persen

No	Komponen Penggunaan	2013	2014	2015	2016*)	2017**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,43	4,28	3,02	4,81	2,79
	a. Makanan, Minuman dan Rokok	2,34	3,99	4,05	5,41	2,98
	b. Pakaian dan Alas Kaki	2,04	0,05	0,06	5,24	3,27
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,50	4,52	1,60	2,66	2,00
	d. Kesehatan dan Pendidikan	3,89	2,24	6,29	4,27	3,88
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,76	6,39	1,10	4,66	2,35
	f. Hotel dan Restoran	8,76	5,02	5,34	6,64	3,28
	g. Lainnya	2,27	4,34	2,26	5,41	3,17
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,81	-2,13	6,23	4,82	2,84
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,21	1,71	6,07	5,90	3,52
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,49	3,73	2,25	5,52	3,61
	i. Bangunan	2,93	5,62	0,58	6,97	3,42
	j. Non-Bangunan	9,58	1,01	4,86	3,35	4,00
5	Perubahan Inventori	1,09	46,92	-0,57	77,32	0,24
6	Ekspor	3,6	2,7	1,8	1,7	0,04
7	Impor	3,9	2,9	-0,2	1,8	-0,01
	PDRB	**4,06**	**5,04**	**5,44**	**3,83**	**2,94**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
Jalan Pahlawan No.140 Sidoarjo
Telp (031)8941744 - Fax (031)8946473
Email : bps3515@bps.go.id